

BAB IV

FAKTOR DAN IMPLEMENTASI PINJAMAN TERBESAR DARI IDB

4.1. Kepentingan Negara Arab Saudi

Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya muslim bahkan terbesar di dunia, merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Hal ini diimplementasikan dengan adanya hubungan baik Indonesia dan Arab Saudi setidaknya dilandasi oleh berbagai persamaan kepentingan dan budaya.

Sudah sejak lama, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Arab Saudi memberikan dukungan politik kepada Indonesia dan mendukung posisi Indonesia pada forum- forum internasional. Hubungan baik Indonesia - Arab Saudi terjalin semakin erat pada era Presiden Soekarno dengan Raja Faisal dan kini diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. (Dikutip dari Sindonews.com, 8 Mei 2017)

Sebagaimana teori konstruktivis yang menyatakan bahwa kepentingan sebagai dasar tindakan atau perilaku politik merupakan produk dari identitas aktor-aktor, begitu pula sebaliknya bahwa aktor-aktor politik (agent) melaksanakan peran penting dalam mewujudkan kepentingan yang didasarkan oleh identitas. Dalam kasus Islamic Development Bank, negara-negara dalam IDB tentu memiliki kepentingan yang didapat dari hasil identitas aktor dan diaplikasikan ke dalam perilakunya. Hal ini tidak terkecuali pada negara Arab Saudi sebagai pemimpin dari bank tersebut tentunya memiliki kepentingan-kepentingan yang menggunakan bank tersebut sebagai “kendaraannya”.

4.1.1. Memiliki Kendali terhadap Negara-Negara Muslim

Memenuhi dan mempertahankan perannya sebagai pemimpin dalam masyarakat Islam adalah prioritas kebijakan luar negeri untuk Arab Saudi dan menganggap dirinya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas pengembangan, kerjasama, dan dukungan daerah . Arab Saudi mengambil inisiatif untuk menemukan dan menganggap sponsor utama beberapa Bank Daerah paling mungkin untuk mendapatkan kepemimpinan di wilayah Arab dan pinggirannya tanpa campur tangan negara-negara G7 . Negara-negara G7 adalah Kelompok tujuh negara industri maju yang terdiri dari AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. Kelompok G-7 dibentuk terutama untuk meningkatkan kerja sama antara negara maju. Negara-negara G-7 menguasai sekitar dua pertiga GNP dunia dan sekitar separuh perdagangan internasional.

Hubungan Arab Saudi dengan kelompok negara G7 sendiri tidak harmonis, mengingat kejadian embargo minyak mentah oleh the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada negara-negara barat karena dianggap mendukung Israel dalam perang Yom Kippur, 1973. Perang Yom Kippur merupakan perang antara Israel melawan negara-negara Arab, termasuk Irak, Suriah, dan Mesir, yang tergabung dalam Liga Arab (the Arab League). Perang ini memperebutkan dataran tinggi Golan yang dikuasai tentara Israel

Maka dari itu, Arab Saudi menjalankan agenda politiknya di dunia Islam tanpa campur tangan negara-negara G7 melalui IDB. Arab Saudi menciptakan satu set negara anggota yang beruntung dan kurang beruntung di dalam institusi

tersebut. Kegiatan bantuan pembangunan di negara-negara berkembang yang menjadi sasaran bantuan IDB, di bawah kendali negara Arab Saudi.

Terbukti pada 15 Desember 2017, melalui berita Saudi Press Agency (SPA), Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi militer Islam yang terdiri dari 34 negara untuk memerangi terorisme. Negara-negara yang tergabung disebutkan telah memutuskan pembentukan aliansi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi dengan fokus tema untuk memerangi terorisme, dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer

4.1.2. Doktrin Anti-Syiah

Muslim terpisah dalam dua kelompok utama, Sunni dan Syiah. Perpecahan berasal dari pertikaian yang terjadi tidak lama setelah meninggalnya Nabi Muhammad tentang siapa yang seharusnya memimpin umat Muslim.

Di Timur Tengah agama menjadi sebuah persoalan serius. Konflik Sunni-Syiah juga sudah dalam mengakar. Arab Saudi adalah negara dimana terdapat dua tempat paling suci Islam, Mekkah dan Madinah, sehingga menyatakan diri sebagai 'pemimpin Sunni dunia'.

Arab Saudi, dengan arus Salafi Sunni Islam sebagai agama negara yang doktrinnya anti-Syiah, berada di garis depan untuk mendukung blok Sunni bersatu melawan "Sumbu Perlawanan" yang dipimpin oleh pemerintah terafiliasi Syiah Iran, Suriah, dan Partai politik Syiah Hizbullah di Lebanon (Clark 2012). Selain itu, Arab Saudi diyakini menggunakan bantuan pembangunan ke negara-

negara di kawasan tersebut untuk menunjukkan kepada pemerintah berafiliasi Syiah bahwa negara tersebut adalah negara terkemuka di dunia Islam (Al-Yahya dan Fustier 2011).

Kepentingan Saudi di wilayah Arab dan pinggirannya sangat terkait dengan kepercayaan agama. Ini adalah konsekuensi yang dikaitkan dengan polarisasi masyarakat Islam berdasarkan afiliasi Islam di mana dukungan politik internasional di antara yang sama dengan denominasi Islam adalah norma (Clark 2012, Keath 2013). Sebagian besar penduduk Muslim, yang terdiri dari 95 persen dari totalnya, berafiliasi dengan cabang Islam Sunni atau Syiah, yang menghasilkan pembagian dua sisi dunia Islam yang cukup jelas (Pusat Penelitian PEW 2009a, 2009b). Perpecahan Sunni-Syiah dapat ditelusuri kembali ke perselisihan suksesi untuk menunjuk pemimpin komunitas Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 AD (Clark 2012). Calon yang ditunjuk tidak pernah sepenuhnya dikenali oleh semua murid Nabi, menghasut sebuah divisi dalam umat Islam sesuai dengan yang diterima sebagai pemimpin mereka yang sah. Kelompok yang berbeda ini akan berkembang menjadi Sunni, yang sepenuhnya mengenali calon yang ditunjuk, orang Syi'ah, yang secara parsial mengenali nominasi yang ditunjuk, dan pelatih kecil Islam lainnya (Clark 2012). Dasar dan perluasan khalifah yang berbeda sepanjang sejarah telah membentuk konfigurasi dunia Islam di sepanjang denominasi yang berbeda sampai sekarang. Biasanya, Sunni telah memegang kekuasaan dan Syiah telah muncul sebagai oposisi mereka (Clark 2012, Abdo 2013).

Menteri Pertahanan Arab Saudi sekaligus wakil putra mahkota kerajaan Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud berpendapat bahwa ajaran yang ada dalam Syiah tidak sesuai dengan Islam. Bahkan, ia menyebutnya sebagai sebuah ideologi para ekstremis. Tidak jarang dikarenakan perbedaan ideologi ini membuat Arab Saudi enggan untuk berunding dengan negara-negara berideologi Syiah dalam forum-forum Internasional. Sebagai contoh, Ia juga menolak berunding dengan Iran atas sejumlah konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya masalah Suriah dan Yaman. Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran telah terjadi sejak 1979 lalu. Saat itu, masing-masing pihak nampaknya ingin memegang kendali lebih kuat dalam dunia Muslim. Persaingan kedua negara itu pun juga berlanjut dalam setiap konflik yang terjadi di Timur Tengah. Seperti Suriah dan Yaman, di mana masing-masing mendukung sisi berlawanan.

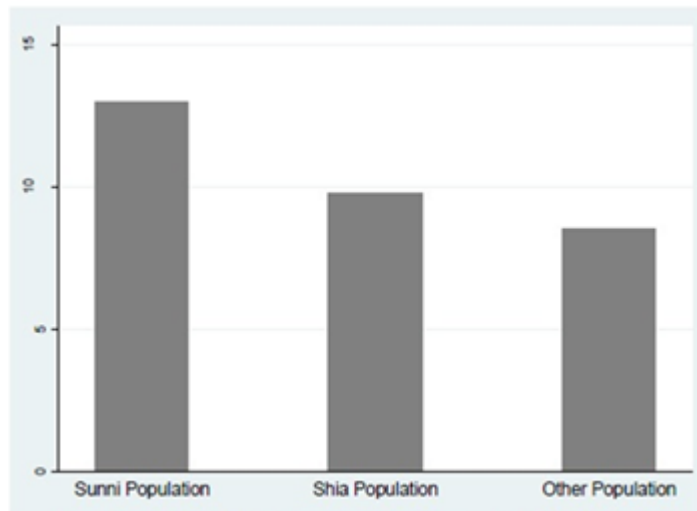
Jalaluddin Rahmat, salah satu tokoh Syiah di Indonesia, menuding Arab Saudi sebagai pendana kampanye anti-Syiah di tanah air. Dana dari Arab Saudi juga membantu pendirian madrasah-madrasah di Indonesia kita kenal sebagai pusat penyebaran kebencian terhadap Syiah.

Koalisi militer Islam yang dipimpin oleh Arab Saudi, terdiri dari 34 negara berisi sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, termasuk negara kuat di Teluk dan Turki, kecuali Iran dan Suriah. Dengan tidak masuknya Iran dan Suriah, negara yang mayoritas berpaham Islam Syiah, tampak sekali bahwa aliansi ini berisi negara-negara yang berpaham mayoritas Islam Sunni.

4.1.3. Membangun Peradaban Islam Moderat

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Arab Saudi lebih menyukai populasi Sunni dalam hal kerjasama pembangunan. Ousman (2012), misalnya, mengidentifikasi bahwa sumber daya IDB untuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran sekolah, sebaiknya dialokasikan di dalam komunitas di mana kaum muda mengikuti prinsip Salafi yang terkait dengan ajaran anti-Syiah. Demikian juga, Al-Yahya dan Fustier (2011) dan Burke (2012) sepakat bahwa lonjakan bantuan pembangunan Arab Saudi ke Yaman pada dasawarsa sebelumnya melalui IsDB dan agensi lainnya adalah sebagai tanggapan atas eskalasi konflik bersenjata antara pemerintah Yaman, Kelompok berafiliasi Sunni, dan kelompok pemberontak Syiah di wilayah yang berbatasan dengan Kerajaan Saudi. Cooper (2007) melaporkan bahwa dengan putus asa tawaran agar koalisi pimpinan Hizbullah tidak memperoleh kekuasaan di Lebanon, Arab Saudi mengalokasikan sumber daya IsDB senilai US \$ 250 juta kepada Perdana Menteri Fouad Siniora yang baru terpilih dari faksi Sunni pada tahun 2005. Al Arabiya (2013) mendukung pendanaan ke Mesir dari IsDB meningkat secara signifikan di tahun 2012 untuk memperkuat pemerintahan Mohammed Morsi yang dipimpin Sunni. Selain itu, Deegan (1995) menyatakan bahwa Arab Saudi memiliki pengaruh terhadap IDB pada tahun 1983 untuk menekan pemerintah Sudan untuk menyatakan negara tersebut sebuah negara Islam berbasis Sunni dalam konstitusi sebagai imbalan atas bantuan pembangunan.

Grafik.4.1. Perbandingan Politik Afinitas IDB



Dalam grafik 4.1. terlihat bahwa bantuan yang diberikan oleh IDB, diprioritaskan kepada negara-negara dengan populasi muslim sunni dibandingkan populasi syiah dan lainnya. Hal ini berkaitan dengan kepentingan Arab Saudi yang ingin mengembangkan islam moderat di negara-negara sunni.

IDB pun turut dalam mengembangkan arus keuangan berbasis syariah dengan adanya Saudi Exports dan International Trade Finance Corporation (ITFC), suatu badan otonomi dalam Grup Bank Pembangunan Islam (IDB). Tujuannya adalah untuk memperkuat akses bilateral dan mempromosikan model pembiayaan perdagangan syariah, serta bertukar pandangan antar-pengusaha dari negara-negara anggota agar terciptanya kehidupan islam yang moderat.

Banyak pengamat yang menilai bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara moderat. Islam moderat yang berkembang di Indonesia terbukti mampu membangun konstruksi antaragama dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini membuat berbagai negara belajar

dan terinspirasi Islam moderat dari Indonesia untuk membangun perdamaian di negaranya masing-masing.

Dengan adanya perdamaian, merupakan modal untuk membangun peradaban. Arab Saudi pun melihat Indonesia sebagai negara muslim terbesar sehingga bisa menjadi partner yang potensial untuk mengembangkan kerjasama di segala hal, termasuk di bidang energi, bidang pendidikan dan sebagainya.

4.2. Posisi Strategis Negara Indonesia

Indonesia dengan subyeknya yang berupa Negara, memiliki norma atau konstitusi berupa Pancasila dan UUD 1945 yang mewajibkan kepada warga negaranya untuk taat atau patuh kepada asas religiusitas yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini membuat Negara Indonesia menjadi negara yang agamis.

Berawal dari fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim sunni, membuat Indonesia memiliki kepentingan untuk dapat bergabung dengan OKI pada tahun 1900-an, ditandai dengan kehadiran Kepala Negara/Pemerintah dalam Summit Meeting OKI untuk yang pertama kalinya. Kemudian pada konferensi Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam yang kedua di Karachi pada Desember 1970 dengan Agenda pertemuan tersebut adalah *“Economic, Cultural, and Social Co-operation among Participating States”* salah satu pembahasannya adalah Bank Muslim Internasional untuk perdagangan dan pembangunan, negara-negara anggota OKI juga bersepakat untuk membuat Bank yang memiliki dan mengaplikasikan nilai-nilai islam (syariah) guna

mempromosikan keuangan syariah dan membantu kesejahteraan negara-negara muslim di Dunia dan membantu memulihkan martabat Islam.

Sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa tindakan aktor negara dipengaruhi oleh bentuk sistem internasional, maka dari itu tindakan negara-negara muslim yang mengaplikasikan keuangannya bergantung pada kondisi keuangan global dan dalam pembangunannya melibatkan pinjaman asing, membuat negara-negara tersebut tunduk dan patuh terhadap prinsip, norma serta aturan yang ada di dalam rezim tersebut. *Collective meaning* pun membuat pembangunan suatu negara merupakan sebuah keharusan dan dalam mengatur keuangannya harus didasarkan pada keuangan yang tidak merugikan atau dengan kata lain menggunakan system keuangan yang berbasis syariah. Konstruktivisme juga memberikan pengaruh untuk memacu negara-negara Internasional dalam berlomba-lomba membangun negaranya. Hal ini dibuktikan adanya kesepakatan pemahaman internasional dengan adanya tolak ukur pembangunan. Untuk mengetahui tolak ukur pembangunan negara-negara muslim, menggunakan I-HDI, yakni index yang tidak hanya menghitung pada tingkat aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan saja namun juga aspek kerohanian. Selain itu, sistem yang dibuat oleh IDB membuat pengaruh pada perilaku negara-negara. Ketentuan tersebut dapat dilihat ketika IDB mengapresiasi pertumbuhan bank-bank syariah di negara-negara anggotanya. Termasuk di Indonesia, sebagai akibat dari adanya perjanjian pinjaman tersebut, banyak didirikannya bank-bank syariah.

Dibutuhkan pula *bargaining* sesuai dengan model politik-birokratik bahwa Politik Luar Negeri merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan

perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi, *bargaining game* antar bangsa, sehingga pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial.

Perwakilan Indonesia dalam model ini berusaha bertindak politik untuk saling bersaing dalam memposisikan negaranya dalam IDB terutama untuk meyakinkan kesembilan negara direktur eksekutif untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang diinginkan. Setiap aktor negara berusaha menetapkan tujuannya, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan dengan berbagai alternatif yang dijalankan melalui *bargaining*. Hal ini terlihat ketika masing-masing perwakilan negara saling beradu dalam hal mendapatkan jumlah pinjaman yang diinginkan dari IDB.

Dengan bermodal Indonesia yang telah memiliki *bargaining positions* dalam IDB yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, salah satunya Indonesia selalu aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, dukungan finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, membuat Indonesia memiliki kepentingan agar IDB dapat berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan.

Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan.

Dukungan finansial, antara lain kontribusi Indonesia ke dalam modal IDB (*ordinary capital resources*) sebesar 2,32 persen di IDB membuat Indonesia

menempati 12 negara pemodal terbesar IDB, kontribusi Indonesia ke dalam modal *Export Financing Scheme (EFS)*-IDB, dan penyertaan Indonesia ke dalam modal *The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC)*.

Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan *national agency* di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai *channeling, line atau executing agent* IDB di Indonesia.

Perpolitikan Indonesia dalam IDB juga terlihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara pendiri IDB. Hal ini membuat Indonesia tergabung dalam *Board Executive Director (BED)*, dan turut membangun *Country Gateway Office (CGO)* di Indonesia.

Pada saat menjadi tuan rumah sidang IDB ke 41, Indonesia juga berkesempatan memilih tema apa yang akan diangkat. Dikarenakan pemerintahan Indonesia pada saat ini sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur, maka tema yang diangkat dalam sidang adalah mengenai “pembangunan infrastruktur”. Salah satu faktor diatas itu lah yang membuat Indonesia mendapatkan dampak positif dengan adanya hasil MCPS ke-II yang membuat Indonesia mendapatkan pinjaman separuh dari dana yang dikeluarkan oleh IDB.

Negara Indonesia yang juga merupakan negara berbasis demokrasi, maka negara yang dikendalikan pemerintah bebas mengembangkan pembangunan yang

sekiranya hal tersebut menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Tentunya dengan kondisi demokrasi, IDB berharap proyek yang diberikan kepada Indonesia dapat selesai dengan tepat waktu agar Indonesia sebagai peminjam dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut secepatnya.

Selain, IDB memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dana negara-negara Islam untuk pembangunan dan secara aktif memberi jaminan bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara anggotanya. Keberadaan IDB juga memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Akhirnya pada periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki.

Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia Berdiri tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga saat ini, bank syariah di Indonesia sudah banyak bermunculan. Seperti Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Victoria Syariah.

Pinjaman yang diberikan IDB pada MCPS ke-II dapat dibilang menguntungkan dikarenakan IDB menggunakan sistem keuangan berbasis syariah seperti; tidak mengenal adanya bunga, biaya pinjaman hanya dikenakan terhadap dana yang telah ditarik/digunakan, tidak terdapat *front-end fee* dan *commitment fee*, dan terdapat *rabat (discount)* jika membayar tepat waktu.

Ketentuan IDB yang tidak menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan, tertuang pada Equity Preparation dalam booklet *Modes of Finance* yang dikeluarkan oleh portal resmi *Islamic Development Bank* pada 1435 H / 2014 M. Ketentuan ini berbunyi bahwa “*IDB does not acquire majority or controlling interest in the share capital of a company*”.

4.2. Implementasi Pinjaman untuk Pembangunan Indonesia

Ketertinggalan Indonesia menurut perhitungan I-HDI, menuntut Indonesia melakukan proyek pembangunan besar-besaran, ditambah lagi dengan visi-misi Presiden saat ini, Jokowi yang mencanangkan proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia sehingga memiliki julukan sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/22/060000726/Jokowi.SBY.dan.Infrastruktur>, diakses pada 26 Februari 2017)

Pinjaman lunak tanpa bunga dari program Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari IDB menjadi solusi ketika tiga sektor utama menjadi tugas terbesar dalam rangka mencapai target pembangunan dalam RPJMN. Tiga sektor tersebut meliputi: proyek perbaikan kawasan kumuh, pengembangan empat universitas dan proyek transmisi listrik.

4.2.1 Pengembangan Empat Universitas

Guna memperbaiki pendidikan dan kesejahteraan di dalam negeri, Pemerintah meminjam dana bantuan asing kepada IDB sebanyak US\$176,5 untuk mendukung program pengembangan empat perguruan tinggi Islam. Empat perguruan tinggi tersebut diantaranya; Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Banten, Universitas Malang di Jawa Timur, Universitas Jember di Jawa Timur dan Universitas Mulawarwan di Kalimantan Timur. Empat perguruan tinggi diatas menetapkan menjadi satu kesatuan proposal *Four in One (Project 4 in 1)*, yang masing-masing perguruan tinggi menentukan tema pusat unggulannya atau disebut *Center of Excellent (CoE)*.

CoE juga diperuntukkan kepada empat perguruan tinggi lainnya yaitu, Universitas Jember (UNEJ), Universitas Mulawarman, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang tergabung dalam *project four in one*. CoE difungsikan pada penguatan daya saing bangsa (*National Competitiveness*) dengan fokus inovasi yang sesuai dengan karakter dan keunikan masing-masing universitas.

Milestone Proyek Pengembangan 4 Universitas ini diharapkan selesai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tahun 2016 diawali dengan persetujuan pendanaan IDB dan penandatanganan *Financial Agreement* pada 18 Mei 2016 yang dilanjutkan dengan implementasi, advance procurement dan persiapan *Soft Program* yang berupa panduan pelaksanaan pembangunan (*staff development, curriculum development, research grant dan research consortia*) serta sosialisasi *Soft Program* di masing-masing universitas. Tahun 2017 merupakan

awal konstruksi dan pelaksanaan Soft Program serta familiarisasi program ke IDB Headquarters. Pengembangan pembangunan bagi ke-4 CoE Universitas ini akan terus berlanjut pada tahun 2018 berupa pengadaan peralatan dan pelaksanaan Soft Program berupa penerapan kurikulum di perguruan tinggi penerima Project 4 in 1. Pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2019 sejalan dengan penginstalasian semua peralatan gedung CoE. (dikutip dari <http://www.dikti.go.id/kolaborasi-riset-kemenristekdikti-dengan-4-empat-perguruan-tinggi-project-4-in-1/>, diakses pada 1 Maret 2017)

Alasan mengapa empat universitas ini yang dipilih, dikarenakan Pembangunan CoE ini difokuskan untuk ketahanan pangan Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas produksi beras Indonesia melalui pengembangan karakteristik genetika sehingga menghasilkan produksi unggulan beras Indonesia. Kolaborasi riset yang dilakukan oleh 4 (empat) perguruan tinggi ini berupa pengembangan di bidang *Genetic Marker* oleh Universitas Jember yang nantinya akan menjadi Pusat Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Negeri Malang melakukan pengembangan di bidang Genetic Mapping yang nantinya akan menjadi Pusat Inovasi Pendidikan, Universitas Mulawarman mengembangkan *Morphological Character* menjadi Pusat Kajian Tropis untuk bidang tumbuhan dan penyakit. Sedangkan analisis *Physicochemical* dilakukan oleh Universitas Tirtayasa yang menjadi Pusat Teknologi Ketahanan Pangan.

Pada pengelolaannya, di masing-masing universitas membentuk *Project Implementation Unit* (PIU) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap

hasil dan laporan-laporan dalam melaksanakan program-program yang sudah dirancang dan disepakati, yang akan dilaksanakan dalam 4 tahun ke depan.

A. Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta)

Untuk memiliki kampus yang representatif, Untirta pada tahun 2004 mengajukan permohonan bantuan pinjaman luar negeri (Loan) kepada *Islamic Development Bank* (IDB) melalui pemerintah yaitu Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas. Meskipun sudah masuk Blue Book di Bappenas namun tak kunjung terwujud karena belum adanya sertifikat sebagai bukti pembelian tanah yang diperoleh dari hibah pemerintah provinsi Banten, sedangkan salah satu syarat yang dipertimbangkan untuk mendapat pinjaman (*Loan*) dari IDB atau dari sumber lain, tanah yang akan didirikan bangunan di atasnya harus sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baru pada tahun 2014-2015, secara simultan dibuat *Master Plan* Pembangunan Kampus Terpadu Untirta di Sindang Sari, kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, kemudian dikomunikasikan dengan Kemenristek Dikti dan pada tahun 2015, Untirta mendapatkan pinjaman dari IDB.

Untirta menetapkan center of excellent dengan tema *food security* terdiri atas empat sektor kunci yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan gedung yang terdiri dari: gedung Rektorat, 4 gedung Dekanat terintegrasi dengan ruang kuliah (Fakultas Hukum, Pertanian, Ekonomi dan FISIP), ruang

kuliah terintegrasi yang bisa dimanfaatkan oleh semua fakultas, gedung Serba Guna (Auditorium) terpadu dengan pusat kegiatan peningkatan kompetensi, gedung Perpustakaan, dan Dormitori (Asrama Mahasiswa).

Dipilihnya tema *Food security* (Ketahanan Pangan) didasari pemikiran perubahan iklim di provinsi Banten berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan ketersediaan berbagai jenis pangan dan ketahanan pangan. Hal ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwasanya Provinsi Banten memiliki lahan pertanian yang luas, akan tetapi tidak kurang dari 50.000 hektar yang sudah alih fungsi dengan hadirnya pabrik-pabrik yang padat karya dan padat modal. Hal ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan petani dalam mengelola lahan pertanian. Selain itu, Provinsi Banten memiliki pantai terpanjang kedua di Indonesia yang memiliki potensi pangan ikan laut, Provinsi Banten juga memiliki ragam (diversifikasi) pangan lokal yang belum dijadikan pangan alternatif secara optimal, penelitian yang dilakukan Untirta banyak mengambil tema tentang pangan dan Untirta memiliki MoU dengan Pemerintah provinsi Banten untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten.

Adapun indikator kinerja antara lain; meningkatnya indeks publikasi, hak kekayaan intelektual, jumlah *prototype* yang dihasilkan, meningkatnya peringkat perguruan tinggi, meningkatnya jumlah mahasiswa dan bertambah 20 orang dosen yang menyelesaikan studi program S3 (Ph.D) di luar negeri, adapun jumlah penelitian sebanyak 50 judul riset dikelola oleh LPPM untuk peneliti dari Untirta untuk berbagai Fakultas dan Jurusan yang terkait *Food*

Security yang diinstruksikan oleh Kemenristekdikti. Besaran bantuan dana bagi peneliti terbagi 3 sampai 4 orang perkelompoknya, dengan nilai sebesar 7500 dolar, serta meningkatnya kompetensi 250 orang tenaga kependidikan dalam berbagai bidang, terbentuknya Pusat Keunggulan Ketahanan Pangan serta meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) mahasiswa di provinsi Banten.

Hasil proyek yang dibiayai IDB meliputi terbangunnya 11 unit gedung, bertambahnya fasilitas infrastruktur dengan sarana pendukungnya, dihasilkan revisi kurikulum 10 program studi, 50 judul penelitian dengan tema Ketahanan pangan, satu judul payung penelitian, meningkatnya peringkat terakreditasi A, buku teks dan jurnal. Dana yang dibutuhkan untuk pengembangan kampus Untirta sebagai Pusat Keunggulan Ketahanan Pangan sebesar. 53.679.600,10 dollar atau Rp. 724.674.060.000,- dengan rincian bersumber dari IDB 49,882,250,00 dollars, dari Pemerintah Republik Indonesia (GOI) 3,797,310,00 dollar dana pendampingan dari Untirta melalui dana PNBPNP 3,813,500,00 dollar. (dikutip dari <http://untirta.ac.id/berita/1245>, diakses pada 1 Maret 2017)

A. Hard Program

Untirta memiliki rencana untuk pembangunan gedung di lahan baru Sindangsari. Selain itu juga menyiapkan proses pengadaan peralatan Laboratorium dan fasilitas penunjang lainnya.

B. Soft Program

Untirta melaksanakan kegiatan soft program seperti Beasiswa S3 kepada dosen Untirta untuk studi di luar negeri, hibah penelitian bagi dosen internal melalui *Research Consortia*, dan beberapa program soft lainnya.

B. Universitas Malang

Dilansir dari portal resmi um.ac.id, menurut Staf Ahli Wakil Rektor IV UM, Apif Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D sejak financial agreement dengan *Islamic Development Bank* (IDB) pada Rabu, 18 Mei 2016 di Jakarta International Convention Center (JCC), Universitas Negeri Malang (UM) memasang target menjadi pusat unggulan dalam pembelajaran.

UM akan mengembangkan *Center of Excellence* di bidang Inovasi Pembelajaran. Maka dari itu, UM akan memfokuskan pada *capability development* model yang mengubah paradigma *expert-centered learning* dan *work-based learning* menuju *life-based learning*. CoE bidang Inovasi pembelajaran ini akan diwadahi sebagai I-CLIR (*Indonesia Consortium for Learning Innovation Research*).

IDB di UM sendiri terdapat lima *Person In Charge* (PIC) program; PIC program dijabat oleh Dr. Sintha Tresnadewi, M.Pd. dari Jurusan bahasa Inggris, PIC performance yang mengurus pengadaan, dijabat oleh Drs. Eko Setyawan, S.T, M.T., PIC finansial (keuangan), dijabat oleh Drs. Dwi Agus

Sudjimad, M.Pd, dan PIC monitoring dan evaluasi dijabat oleh Apif Miptahul
Hajji, ST., M.T., M,Sc., Ph.D.

A. Hard Program

Kegiatan yang berkaitan dengan hard program terdiri dari pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung yang rencananya dipusatkan di Jalan Simpang Bogor. Kedua gedung tersebut merupakan Gedung PPG, yang luasnya 44.874 meter persegi, dengan dua tower sembilan lantai. Guna mendukung pengembangan pusat unggulan di UM, pengadaan peralatan pembelajaran yang akan masuk ke gedung, adalah peralatan laboratorium dan juga perabotan mebel. Selain itu, didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan untuk memberikan akses keluar masuk kendaraan yang aman dan nyaman dan ditambah dengan penataan jaringan listrik di luar gedung sehingga dapat memberi penerangan yang baik.

B. Soft Program

Untuk mendukung pengembangan pusat unggulan lebih lanjut, UM melakukan pengadaan buku dan jurnal. Hal ini dilakukan untuk pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)/ peningkatan kemampuan staf akademik. Para dosen yang berkaitan dengan pengembangan pusat unggulan ini dikuliahkan lagi atau mengikuti pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam menempuh studi ini, dosen bisa memilih *degree* dan *nondegree*.

Jumlah keseluruhan dosen yang mengikuti studi dan pelatihan sejumlah 109 orang, baik yang menempuh pendidikan diluar negeri maupun di dalam negeri. Dosen yang dikuliahkan atau yang mengikuti pelatihan, jurusan dan kompetensinya sesuai pada ketentuan IDB.

Sedangkan untuk pengembangan riset dibagi menjadi dua kelompok yaitu; research grant dan research consortia. Research grant ini sudah ada 66 judul yang akan dilaksanakan selama tiga tahun 2017-2019. Tahun pertama nanti 2017 akan dilaksanakan riset 20 judul, 2018 ada 20 judul, dan 2019 research 26 judul. Judul-judul penelitian tersebut harus mengacu pada pusat unggulan. sehingga judul-judulnya/topik-topiknya juga sudah ditentukan. Topik-topik ini dirancang untuk menunjang pengembangan pusat unggulan UM. Hasil-hasil penelitian nanti jika dijurnalkan, dan menjadi buku diharapkan bisa menunjang pusat unggulan UM ini. (dikutip dari <http://piu-idb.um.ac.id/index.php/2016/09/22/idb-wujudkan-um-learning-innovation/#more-65>, diakses pada 4 Maret 2017)

C. Universitas Jember

Universitas Jember merupakan universitas dengan pusat keunggulan bioteknologi. Identitas sebagai pusat keunggulan bioteknologi ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Latar belakang penunjukan Universitas Jember sebagai pusat keunggulan bioteknologi didasarkan pada prestasi yang sudah dicapai oleh

para peneliti di Universitas Jember, khususnya para peneliti yang tergabung dalam *Center for Development of Advanced Technology (CDAST)*. Fokus utama pengembangan bioteknologi di Universitas Jember ada pada bidang pertanian dan kesehatan.

A. Hard Program

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana seperti laboratorium lengkap dengan unit penunjangnya, yakni laboratorium terpadu tanaman dan pengobatan alami, laboratorium terpadu IPA dan teknologi pangan, laboratorium terpadu hukum dan kebijakan publik dan sarana pendukung seperti auditorium berkapasitas 3.000 orang.

B. Soft Program

Pengembangan staf yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan staf akademik maupun staf non akademik melalui pendidikan bergelar (*degree program*) dan pendidikan tanpa gelar (*non-degree training/program*), baik di dalam maupun di luar negeri, serta *inhouse training program*. Selain itu, juga untuk membiayai studi doktoral 20 dosen dan pengiriman 102 dosen untuk melakukan post doktoral serta penelitian.

D. Universitas Mulawarman

Unmul mendapat pinjaman dana hibah Rp 700 miliar dari IDB melalui Kemenristekdikti. Kemenristekdikti menetapkan Universitas Mulawarman sebagai pusat keunggulan kajian tropis untuk tanaman dan penyakit.

A. Hard Program

Rektor Unmul Prof Masjaya menyebutkan bahwa anggaran IDB yang diterima Unmul itu nantinya akan difokuskan pada pembangunan enam gedung, yakni, bidang farmasi, pengembangan SDM, kesehatan masyarakat, laboratorium riset terpadu, teknologi dan informasi. (dikutip dari <http://universityreview.id/2016/06/06/rektor-unmul-dana-idb-rp700m-digunakan-untuk-bangun-6-gedung/>, diakses pada 5 Maret 2017)

1. Gedung Pusat Pembelajaran

Gedung Pusat Pembelajaran memiliki luas lantai sekitar 3500 meter persegi. Lantai pertama adalah biologi dasar laboratorium, vivarium, ruang binatang penyimpanan spesimen dan toilet. Lantai dua laboratorium dasar fisika, laboratorium kimia, ruang penelitian, ruang dosen, ruang persiapan, penyimpanan dan toilet. daerah perpustakaan ruang ketiga, ruang staf, ruang doa dan toilet. Lantai keempat adalah convention hall, ilmu ruang belajar bagi fisik, biologi dan kimia, toilet dan penyimpanan sebagai layanan. Tangga dan ramp dilengkapi transportasi vertikal iklan. Bangunan dibangun dengan bingkai kaku beton bertulang. bahan lokal digunakan untuk mendukung

pembangunan gedung digunakan untuk mendukung pembangunan gedung.

2. Laboratorium Berintegrasi

Bangunan ini terdiri dari 4000 meter persegi. Lantai pertama dirancang untuk area parkir dan dermaga pemuatan. Toilet dan lift yang direncanakan akan didirikan. Lantai dua untuk penyimpanan, gudang dan toilet. Lantai ketiga adalah untuk penelitian ilmu muka, penelitian lingkungan dan ruang kuliah teater. Lantai empat yang designed untuk laboratorium penelitian kehutanan, dan laboratorium instrumentasi. Lantai lima dimaksudkan untuk digunakan sebagai pertanian dan laboratorium rekayasa. Tangga dan lift akan dilengkapi sebagai transportasi vertikal. Bangunan ini dibangun dengan bingkai kaku beton bertulang. bahan lokal digunakan untuk mendukung pembangunan gedung.

3. Laboratorium Penelitian Farmasi

Laboratorium ini memiliki total luas cakupan dari sekitar 4500 meter persegi. Lantai pertama dirancang untuk perpustakaan, ruang pertemuan, toko obat, kamar buruh, dan toilet. Lantai kedua ditujukan untuk ruang kuliah, laboratorium kimia, laboratorium fisika, kamar

ganti dan toilet. Lantai ketiga ditujukan untuk laboratorium kosmetik farmasi, laboratorium farmasi steril, makanan dan minuman farmasi laboratorium, ruang loker dan toilet. Lantai keempat adalah untuk laboratorium mikrobiologi, laboratorium farmakologi, laboratorium pharmacognosys, alat penyimpanan dan material, dan toilet. Tangga dan jalan akan dilengkapi sebagai transportasi vertikal.

Bangunan ini dibangun dengan bingkai kaku beton bertulang. Lokasi situs berada di area rawa, bangunan mengadopsi gaya lokal bangunan panggung. jenis konstruksi juga dapat memberikan sebuah kolam di bawah lantai. Fungsi tambak sebagai daerah tangkapan untuk mengurangi risiko banjir. kolam ini juga untuk perikanan dapat berlatih lapangan. Air limbah lahan basah akan ditanam dekat gedung, berdekatan dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. bahan lokal digunakan untuk mendukung pembangunan gedung

4. Laboratorium Kesehatan Umum

Bangunan ini memiliki 4000 meter persegi, terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama untuk laboratorium epidemiologi, peralatan gudang, dermaga pemuatan, laboratorium asisten, penyimpanan pasokan sementara dan layanan. Tangga dan jalan yang digunakan sebagai transportasi vertikal. Lantai kedua dirancang untuk mendukung kesehatan dan gizi lingkungan laboratorium. Lantai ini dirancang seperti lantai pertama yang akan memberikan ruang asisten

laboratorium, ruang pasokan laboratorium dan layanan. Lantai ketiga memiliki kesehatan promosi, pekerjaan dan laboratorium keselamatan. Lantai keempat adalah untuk ruang pertemuan, ruang belajar dan perpustakaan. Bangunan ini akan dibangun dengan bingkai kaku beton bertulang. Lokasi situs berada di area rawa, karena itu bangunan akan mengadopsi gaya lokal bangunan panggung. jenis konstruksi juga dapat memberikan sebuah kolam di bawah lantai. Kolam berfungsi sebagai daerah tangkapan air untuk mengurangi risiko banjir lingkungan. Air limbah lahan basah akan ditanam di dekat bangunan dan kolam ini juga untuk perikanan dapat berlatih lapangan. bahan lokal digunakan untuk mendukung pembangunan gedung.

5. Gedung ICT

Bangunan ICT memiliki cakupan lantai total sekitar 3500 meter persegi. Bangunan ini memiliki rencana lantai empat dengan ± 700 meter persegi per setiap lantai. Bangunan ini dilengkapi dengan baik tangga dan lift. Lift akan dimanfaatkan di tepi bangunan, barang dan gerakan spesimen. sirkulasi ganda digunakan di gedung ini dan itu membagi interior bangunan untuk empat kamar kelompok. Bangunan dibangun dengan bingkai kaku beton bertulang. bahan lokal digunakan untuk mendukung pembangunan gedung.

6. Gedung Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Bangunan fakultas adalah sekitar 3500 meter persegi. Lantai pertama terdiri dari tiga kelompok kamar. Kamar administrasi siswa dirancang untuk ruang dekan, ketua kamar program, ruang pertemuan, dan layanan mahasiswa. Di lantai dua, alokasi yang untuk ruang kuliah, ruang doa, ruang seminar dan jasa. Bangunan ini akan dilengkapi dengan tangga dan lift untuk transportasi vertikal. Bangunan ini dibangun dengan bingkai kaku beton bertulang. bahan lokal digunakan untuk mendukung pembangunan gedung.

Laboratorium memiliki 3500 meter luas lantai persegi. Lantai pertama terdiri dari data mining, data base, pemrograman dasar, dan laboratorium kecerdasan buatan. Kamar lain gudang dan jasa. Bangunan ini dilengkapi dengan baik tangga dan lift. Lift akan dimanfaatkan di tepi bangunan, barang dan gerakan spesimen. bahan lokal digunakan untuk mendukung pembangunan gedung.

B. Soft Program

Bantuan dari IDB juga akan digunakan untuk pengembangan di bidang soft program, yang diantaranya pengembangan staff dengan mengirimkan 22 orang dosen untuk melanjutkan ke jenjang PhD dan untuk pengembangan kurikulum dengan spesifikasi tema penelitian mengenai ilmu tropis.

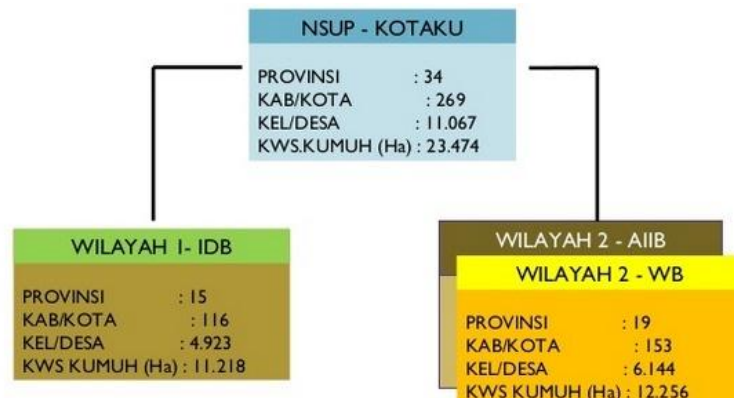
4.2.2 Proyek perbaikan kawasan kumuh

Proyek untuk perbaikan kawasan kumuh didanai oleh tiga lembaga keuangan internasional, yakni IDB, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), dan *World Bank/ Bank Dunia* (IBRD) dengan total sebesar Rp 10 triliun atau 762 juta dollar AS untuk jangka lima tahun, dan disokong oleh pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pihak swasta lainnya.

Proyek perbaikan kawasan kumuh menghasilkan program gerakan Kota Tanpa KUmuh (KOTAKU) yang disusun berdasarkan master plan pemukiman kumuh.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Sri Hartoyo, dengan gerakan KOTAKU, kawasan kumuh di 34 provinsi yang tersebar di 269 kota/kabupaten dan 11.076 kelurahan/desa dengan luas 23.656 hektar akan dihilangkan kumuhnya mulai dari tahun 2016 hingga 2020. (dikutip dari <http://www.beritarayaonline.co.id/program-kotaku-mendukung-gerakan-100-0-100-di-perkotaan-2016-2020/>, diakses pada 26 Februari 2017) .

Gambar 4.2. Lokasi Program KOTAKU



Wilayah yang menjadi fokus pada program KOTAKU, dibagi menjadi 2 wilayah yang diampu oleh masing-masing lembaga keuangan pendonor.

IDB mendapatkan Wilayah 1 dengan rincian; 15 provinsi, 116 kabupaten / kota, 4.923 keluarahan / desa, dan dengan 11.218 hektar kawasan kumuh.

4.2.3 Proyek transmisi listrik

Mega proyek pembangkit listrik 35 ribu MW merupakan salah satu program utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK). Proyek prioritas tersebut lahir berdasarkan keprihatinan Jokowi karena banyak daerah yang belum teraliri listrik. (dikutip dari <https://finance.detik.com/energi/d-3432226/jokowi-71-tahun-merdeka-ri-cuma-punya-listrik-53000-mw>, diakses pada 26 februari 2017)

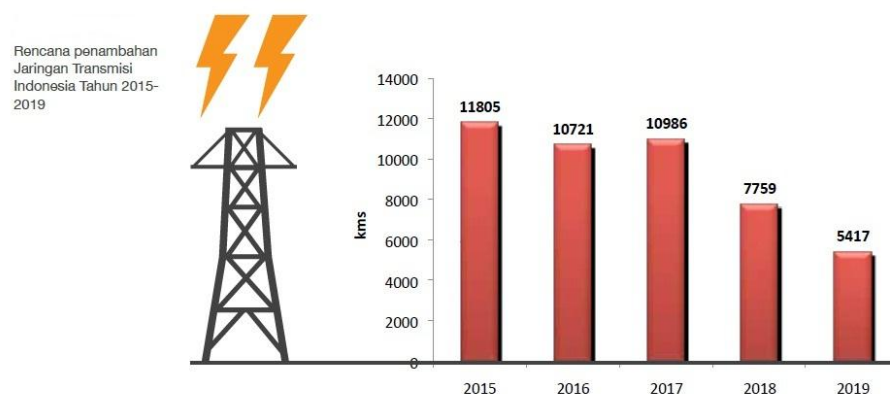
Untuk membangun proyek 35.000 MW, dibutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Sehingga, PLN dibantu oleh produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), dengan cara listrik akan dibeli PLN dari IPP, lalu listrik dialirkan kepada masyarakat melalui jaringan milik PLN.

Dalam proyek ini, PLN akan lebih fokus untuk pembangunan jaringan transmisi dan GI (Gardu Induk). Total dibutuhkan transmisi sepanjang 46.000 km dan 1.375 GI berkapasitas 108.789 MVA untuk proyek 35.000 MW. Menurut perhitungan, dana yang dibutuhkan hingga US\$ 73 miliar atau setara dengan Rp 949 triliun (dengan asumsi kurs Rp 13.000 per dolar AS). (dikutip dari <https://finance.detik.com/energi/3209159/garap-proyek-35000-mw-pln-utang-ke-bank-dunia-hingga-idb>, diakses pada 26 februari 2017)

Berdasar data PLN yang dikutip di detikfinance, jumlah pinjaman dari IDB untuk proyek ini adalah sebesar 300 juta dollar.

Di kutip dari Renstra 2015-2020, pada pada periode 2015 - 2019 pengembangan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik berupa pembangunan Transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV di sistem Jawa - Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur dan Sumatera. Pembangunan sistem transmisi secara umum diarahkan kepada tercapainya kesesuaian antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien. Disamping itu juga sebagai usaha untuk mengatasi bottleneck penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan. Rencana pengembangan jaringan transmisi di Indonesia hingga tahun 2019 diproyeksikan 46.688 kms, dengan perincian pada tabel berikut:

Grafik 4.2. Rencana pengembangan jaringan transmisi di Indonesia



A. Wilayah Sumatera

Di Pulau Sumatera, terdapat 2 (dua) sistem besar yaitu sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Sistem Sumbagut menghubungkan 2

(dua) Provinsi yaitu: Aceh dan Sumatera Utara melalui SUTT 150 kV, sementara itu Sistem Sumbagsel menghubungkan 6 (enam) Provinsi yaitu: Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung melalui SUTT 150 kV. Rencana pengembangan jaringan transmisi di Sumatera yang dibutuhkan dalam kurun tahun 2015- 2019 berturut-turut sebesar 5.663 kms; 4.002 kms; 2.912 kms; 3.478 kms; 3.250 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 19.305 kms.

B. Wilayah Jawa – Bali

Saat ini sistem kelistrikan yang telah terintegrasi dengan baik hanya di Jawa-Bali, dimana sistem kelistrikan Jawa-Bali memiliki 2 sistem interkoneksi, yaitu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sebagai tulang punggung utama (Back Bone) jaringan dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagai jaringan pendukung.

Rencana pengembangan jaringan transmisi di Jawa-Bali yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut- turut sebesar 2.101 kms; 3.701 kms; 2.602 kms; 1.249 kms; 1.553 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 11.206 kms.

C. Wilayah Kalimantan

Di Pulau Kalimantan, SUTT 150 kV baru terdapat pada sebagian kecil wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, sebagian kecil wilayah di Provinsi

Kalimantan Tengah yang terhubung dengan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan sebagian kecil wilayah Kalimantan Timur. Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Kalimantan yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 2.075 kms; 1.128 kms; 2.530 kms; 1.910 kms; 240 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 11.206 kms.

D. Wilayah Maluku & Nusa Tenggara

Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Maluku & Nusa Tenggara yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 1.402 kms; 55 kms; 937 kms; 230 kms; 250kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 2.874 kms.

E. Wilayah Sulawesi

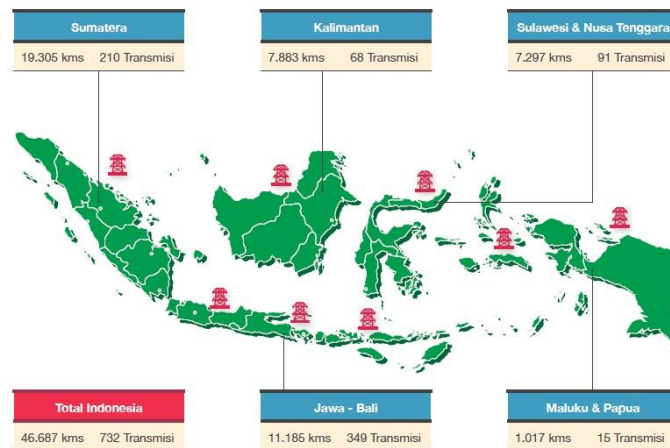
Di Pulau Sulawesi, SUTT 150 kV telah menghubungkan Provinsi Sulawesi Utara dengan sebagian kecil Provinsi Gorontalo yang dinamakan Sistem Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut). Sementara itu Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan juga telah terhubung dengan sebagian kecil daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Sulawesi yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 320 kms; 1.775 kms; 1.945 kms; 892 kms; 54 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 4.986 kms.

F. Wilayah Papua

Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Papua yang dibutuhkan dalam tahun 2015 sebesar 244 kms, tahun 2016 sebesar 60 kms dan tahun 2017 sebesar 60 kms. Untuk tahun 2018 dan 2019 belum ada rencana pengembangan jaringan transmisi di wilayah Papua.

Secara umum, berikut persebaran transmisi listrik :

Gambar 4.3. Persebaran Transmisi Listrik se-Indonesia



4.2.4 Proyek Gardu Induk

A. Wilayah Sumatera

Rencana pengembangan Gardu Induk di Sumatera yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 8.680 MVA; 6.216 MVA; 8.010 MVA; 5.000 MVA; 4.500 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 32.406 MVA.

B. Wilayah Jawa – Bali

Rencana pengembangan Gardu Induk di Jawa-Bali yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 16.456 MVA; 11.617 MVA; 16.230 MVA; 13.700 MVA; 8.080 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 66.083 MVA.

C. Wilayah Kalimantan

Rencana pengembangan Gardu Induk di Kalimantan yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 690 MVA; 1.370 MVA; 720 MVA; 820 MVA; 310MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 3.910 MVA.

D. Wilayah Maluku & Nusa Tenggara

Rencana pengembangan Gardu Induk di Maluku & Nusa Tenggara yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 400 MVA; 460 MVA; 440 MVA; 260 MVA; 280 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari 2015-2019 sebesar 1.840 MVA.

E. Wilayah Sulawesi

Rencana pengembangan Gardu Induk di Sulawesi yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 400 MVA; 1.690 MVA; 770 MVA; 730 MVA; 560 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 4.150 MVA.

F. Wilayah Papua

Rencana pengembangan Gardu Induk di Papua yang dibutuhkan tahun 2015 sebesar 40 MVA, tahun 2107 sebesar 240 MVA dan tahun 2019 sebesar 120 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 400 MVA.